



Dorong Swasta Terlibat Pengelolaan Sampah

YOGYAKARTA, Joglo Jogja - Keterlibatan swasta dalam mengelola sampah di Kota Yogyakarta sampai saat ini masih ditunggu. Ini tak lepas dari kemampuan mengelola dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang baru bisa mengolah 150 ton. Itu dari volume sampah di Kota Yogyakarta yang tiap hari mencapai antara 200 ton sampai 250 ton.

"Harus diakui Kota itu memang tidak punya lahan untuk melakukan pengolahan sampah dalam kapasitas besar,

sehingga kami bekerja sama dengan Kabupaten Bantul melalui Intermediate Treatment Facility (ITF) Bawuran," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan saat Dialog Nasional Operasionalisasi Teknologi Pengolahan Sampah Organik dengan Skema Pembiayaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Kota Yogyakarta dan Aglomerasi Kartamantul di Gedung Science Taman Pintar, kemarin (27/5).

■ Baca **DORONG...** Hal II



DOK: DISKOMINFO YOGYA/JOGLO JOGJA

TERBUKA: Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan (depan, kelima dari kiri) saat dialog bertema pengelolaan

Dorong Swasta Terlibat Pengelolaan Sampah

sambungan dari hal Joglo Jogja

Wawan menjelaskan, kemampuan pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta sangat terbatas. Dari total volume sampah harian di Kota Yogyakarta yang sekitar 200 ton sampai 250 ton baru 150 ton yang mampu diolah mandiri. "Lainnya tadi dengan kerja sama," jelasnya.

Masalah pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, kata Wawan, tidak terlepas dari keterbatasan lahan yang ada. Makanya, saat ini Pemkot Yogyakarta mendorong keterlibatan pihak ketiga yang leluasa dalam pengadaan lahan.

Ia menjelaskan, komposisi sampah di Kota Yogya hampir 60 persen merupakan sampah organik. Tanpa pengelolaan yang tepat sampah organik akan mudah membusuk, menimbulkan bau dan mencemari lingkungan.

"Infrastruktur seperti tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R) dan unit pengolahan sampah organik masih perlu ditingkatkan kapasitas serta jumlahnya. Termasuk, bagaimana menjalin kerja sama dengan pihak ketiga atau mitra swasta dalam pengelolaan sam-

pah secara masif dan lebih komprehensif," terangnya.

Country Manager Yayasan International Council on Local Environmental Initiatives (ICLEI) Indonesia Arif Wibowo menjelaskan, pengelolaan sampah merupakan isu strategis nasional yang harus diselesaikan melalui penerapan teknologi dan tata kelola yang lebih baik.

"Kita harus bisa memahami berapa potensi nilai ekonomi karbon yang bisa diakses sehingga mampu menarik calon investor untuk terlibat. Di mana, ini juga

merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong investasi hijau yang berkelanjutan," jelasnya.

Kolaborasi bersama antara pemerintah dan *stakeholder* terkait akan memperkuat aspek kelembagaan dalam pengelolaan sampah dengan skema pembiayaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Di mana secara regulasi Indonesia sudah kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. (eri/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005